



Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) M Ali Yusuf mengatakan, bahwa perjalanan lembaga filantropi di Nahdlatul Ulama yang dinamakan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), mengalami perkembangan dari waktu ke waktu semenjak didirikan secara resmi Sebagai lembaga baru di tubuh Nahdlatul Ulama paska Muktamar NU 2005 di Solo.

“Kalau tidak ada filantropis di NU, saya rasa Pesantren tidak akan sebesar sekarang, tidak akan ada masjid-masjid NU megah seperti sekarang, juga tidak akan ada kantor-kantor NU di seluruh Indonesia yang berdiri. Saya kira ini bagian dari manfaat filantropi yang dipraktekkan di NU,” tegasnya

Hal itu disampaikan oleh M Ali Yusuf saat menjadi pemateri pada diskusi panel keempat dengan tema “perspektif Islam Nusantara tentang Filantropi, Keadilan, dan Pengentasan Kemiskinan” pada acara Simposium Nasional Islam Nusantara, di Gedung PBNU Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Pria kelahiran Bojonegoro yang juga menjadi ketua Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) itu melanjutkan, bahwa dari sisi concern & isu, saat ini kegiatan filantropi tidak sekedar *charity* tetapi juga merambah ke isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, juga aksi kemanusiaan dan lingkunganhidup bahkan *climate change*.

“Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun, saat ini penghimpunannya melalui lembaga amil zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) baru mencapai 4,5 persen dari total atau sekitar 12 triliun, ini artinya ada kesenjangan yang luar biasa, penghimpunannya masih dilakukan secara sporadis & kurang maksimal

penghimpunannya (*awareness and trust*)," paparnya.

Lalu apakah di masyarakat kita atau karena warga Nahdliyin enggan berderma?, saya rasa tidak, kita lihat sendiri dari data yang dipaparkan oleh Direktur *Social Trust Fund* (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mbak Amelia tadi bahwa Indonesia adalah negara yang paling dermawan sedunia.

Namun lanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi catatan bersama oleh lembaga filantropi khususnya NU, agar lebih berkembang lagi kedepannya sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia, atau paling tidak warga Nahdliyin bisa terselesaikan.

"Saya rasa lembaga filantropi kita perlu memiliki kapasitas adaptif plus kreatif terhadap dinamika situasi secara global, nasional dan lokal, juga kegiatan serta program yang harus memiliki relevansi yang kuat & berbasis hasil yang terukur namun tetap dinamis," ungkapnya.

Kemudian, menurutnya lembaga zakat harus dikelola oleh SDM dengan kapasitas yang cakap sesuai bidangnya, tata kelola kelembagaan yang *agile* tetapi transparan dan memenuhi standar akuntabilitas publik.

"Jadi, perlunya pengurus lembaga zakat yang memang punya bakat dan minat, juga kemampuan kecakapan di bidang zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yang memang sudah terlatih, tentu perlu dukungan secara struktural, jadi tidak hanya karena dia si A, dan si B," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi publik seperti *branding* dan akuntabilitas, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan program serta meningkatkan kepercayaan publik. kemudian setiap aksi kemanusiaan harus berbasis pada pemenuhan standar dan prinsip kemanusiaan serta sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku. (Anty Husnawati)